

RENCANA KERJA BAPENDA KABUPATEN PANGANDARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Kidang Pananjung No.03 Pangandaran 46396
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Kidang Pananjung Pangandaran 46396
email : bapendakabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR :050/320 -BAPENDA/2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
- b. Bahwa Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Renstra BAPENDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala BAPENDA Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra BAPENDA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja BAPENDA adalah dokumen perencanaan BAPENDA untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- 3.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

- 3.5 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
V. Penutup

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Renja BAPENDA Tahun 2024 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPENDA Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BAPENDA ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPENDA

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 30 Agustus 2023



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

Tembusan:

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA	
TAHUN LALU	12
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN	
LALU	12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT	
DAERAH	18
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	
FUNGSI PERANGKAT DAERAH	22
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD	24
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	36
3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	
NASIONAL	37
3.3 ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA	
MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT	39
3.4 ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA	
MENGAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN	
2021-2026	42
3.5 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	45
BAB V PENUTUP	55



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) yang akan ditetapkan untuk Tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

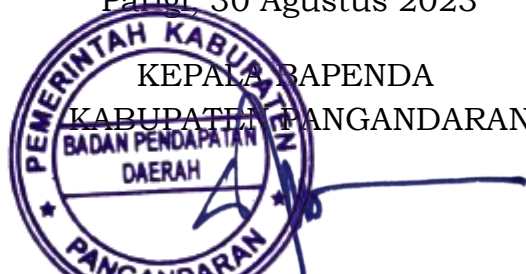
Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan datang agar lebih baik.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada BAPENDA Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 30 Agustus 2023

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN
DAERAH



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730820 199802 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamankan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi diantaranya tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumber daya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan



baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN tahun 2005 - 2025 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025 adalah “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia”. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dalam RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 adalah “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”.

Penyebaran covid-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran covid-19 adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terbatasnya sosial ekonomi mengurangi konsumsi dan kegiatan, investasi melambat sehingga berdampak pada laju perekonomian nasional. Maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2023 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Berdampak juga pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun



- 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);



30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);

43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 77).
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
46. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 050/320-BAPENDA/2023 tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran disusun dengan maksud :

- a. Memberikan acuan resmi bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua stakeholders pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam pada tahun 2024 dapat tercapai.
- c. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah :

- a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun;
 - b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
- dan



- c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a) **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

- b) **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- c) **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- d) **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).



- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

e) BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Anggaran Belanja Langsung yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.443.294.500,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, terealisasi sebesar Rp. 2.169.391.511,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah)atau sebesar 88,79%



Secara lengkap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (capaian kinerja dan realisasi anggaran) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran secara detail dapat dilihat dalam form berikut (TC-29) :



Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2023

BAPENDA KABUPATEN PANGANDARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)			Tingkat Realisasi (2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	100	%	80,1	%	100	%	80,1	%	80,10	100	%	0	%	100,00
		Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	100	%	90,9	%	100	%	90,9	%	90,90	100	%	0	%	100,00
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	100	%	86,13	%	100	%	86,13	%	86,13	100	%	0	%	100,00
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	20	%	0	%	20	%	0	%	0,00	20	%	0	%	100,00
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100	%	0	%	100,00
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	150	Wajib Pajak	574	Wajib Pajak	150	Wajib Pajak	574	Wajib Pajak	382,67	150	Wajib Pajak	0	Wajib Pajak	100,00
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100	%	0	%	100,00
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	100,00
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	80	%	11,67	%	70	%	11,67	%	16,67	72	%	0	%	90,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Tingkat Realisasi (2021)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
4.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	0	Wajib Pajak	16,67
4.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	72	Unit	0	Unit	12	Unit	0	Unit	0,00	12	Unit	0	Unit	16,67
4.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	0	Laporan	16,67
4.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	0	Laporan	16,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Tingkat Realisasi (2021)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
4.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2986	Objek Pajak	486	Objek Pajak	486	Objek Pajak	486	Objek Pajak	100,00	490	Objek Pajak	0	Objek Pajak	16,41
4.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30075	layanan	1950	layanan	5000	layanan	1950	layanan	39,00	5010	layanan	0	layanan	16,66
4.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	0	Dokumen	16,67
4.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	72	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0,00	12	Laporan	0	Laporan	16,67



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Pangandaran, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan program / kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat diform sebagai berikut (T-C 30):



Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD							Realisasi Capaian						Catatan Analisis	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	%			100	100	100	100	100	100	100	80,1	80,1	98,3	0	0	0	0	
	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	%			100	100	100	100	100	100	100	90,9	90,9	69,5	0	0	0	0	
	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	86,13	86,13	74,7	0	0	0	0	
4.1	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	%			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	
	persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	
	Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Wajib Pajak			150	150	150	150	150	150	150	574	574	574	0	0	0	0	
	persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	
	Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
	Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	%			68	70	72	74	76	78	80	11,67	11,67	80	0	0	0	0	



NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD						Realisasi Capaian						Catatan Analisis		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.5	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.6	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.7	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak			486	486	490	495	500	505	510	486	486	486	0	0	0	0	



NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKD						Realisasi Capaian						Catatan Analisis		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.8	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.9	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan			5000	5000	5005	5010	5015	5020	5025	1950	1950	1950	0	0	0	0	
4.1.10	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.11	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.12	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.13	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	
4.1.14	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan perkembangan keadaan isu dan masalah yang ada di Kabupaten Pangandaran, tahun 2023 terdapat beberapa hal yang perlu segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19, yaitu :
 - a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pangandaran seperti perikanan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
 - b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

4. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bapenda dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan seharusnya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat sesuai dengan tujuan bersama yaitu menuju good governance dan clean government. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat serta adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membutuhkan inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Aparatur daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah penghargaan kepada wajib pajak yang patuh pajak. Diharapkan dengan diberlakukannya reward and punishment, yaitu pemberian penghargaan atau hadiah bagi yang patuh pajak dan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Bapenda Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya.

- Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
 5. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
 6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pendapatan daerah;
 7. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
 8. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
 9. Belum optimalnya pengelolaan system informasi daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di atas, maka Bapenda Kabupaten Pangandaran perlu memberikan perhatian dan prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu – isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Penyusunan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2022 dan RKPD tahun 2023

Review RKPD tahun 2024 terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel T-C 31 di bawah ini:.



Tabel T-C 31
Review Terhadap RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	BADAN PENDAPATAN DAERAH					20.584.897.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					20.584.897.000
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN					8.287.347.000	KEUANGAN					8.287.347.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	Kab. Pangandaran	%	100	8.287.347.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	Kab. Pangandaran	%	100	8.287.347.000
		Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	Kab. Pangandaran	%	100			Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	Kab. Pangandaran	%	100	
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	%	100			Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	%	100	
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	Kab. Pangandaran	%	20	8.287.347.000	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	Kab. Pangandaran	%	20	8.287.347.000
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	Kab. Pangandaran	%	100			persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	Kab. Pangandaran	%	100	
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Kab. Pangandaran	Wajib Pajak	150			Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Kab. Pangandaran	Wajib Pajak	150	



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	Kab. Pangandaran	%	100			persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	Kab. Pangandaran	%	100	
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Kab. Pangandaran	Dokumen	12			Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Kab. Pangandaran	Dokumen	12	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pangandaran	%	76			Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	Kab. Pangandaran	%	76	
5.2.4.201.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	3	652.358.950	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	3	652.358.950
5.2.4.201.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	1	209.610.662	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	1	209.610.662
5.2.4.201.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	12	499.420.760	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	12	499.420.760
5.2.4.201.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Paket	5	1.473.085.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Paket	5	1.473.085.000



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.2.4.201.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	2	1.267.923.700	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	2	1.267.923.700
5.2.4.201.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	3	171.886.750	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	3	171.886.750
5.2.4.201.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Pangandaran	Objek Pajak	20000	498.410.760	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Pangandaran	Objek Pajak	20000	498.410.760
5.2.4.201.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	2	292.945.022	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	2	292.945.022
5.2.4.201.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Layanan	1500	800.117.677	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Layanan	1500	800.117.677
5.2.4.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Pangandaran	Dokumen	1	483.069.327	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Pangandaran	Dokumen	1	483.069.327
5.2.4.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	4200	1.009.552.570	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	4200	1.009.552.570



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.2.4.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	245	171.876.750	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	245	171.876.750
5.2.4.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	60	670.909.670	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	60	670.909.670
5.2.4.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	20	86.179.402	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Laporan	20	86.179.402
	NON URUSAN					12.297.550.000	NON URUSAN					12.297.550.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Kab. Pangandaran	%	93	12.297.550.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Kab. Pangandaran	%	93	12.297.550.000
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Kab. Pangandaran	%	100			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Kab. Pangandaran	%	100	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Kab. Pangandaran	%	95			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Kab. Pangandaran	%	95	
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kab. Pangandaran	%	97			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kab. Pangandaran	%	97	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	%	97	55.125.000	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	%	97	55.125.000



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	%	97			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	%	97	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	%	97			Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	%	97	
X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	4	38.587.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Dokumen	4	38.587.500
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	4	16.537.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	4	16.537.500
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran	%	90	6.152.496.638	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran	%	90	6.152.496.638
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Orang / Bulan	280	6.064.296.638	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Orang / Bulan	280	6.064.296.638
X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Dokumen	5	38.587.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Dokumen	5	38.587.500



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	1	16.537.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	1	16.537.500
X.XX.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	12	16.537.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	12	16.537.500
X.XX.1.202.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Dokumen	12	16.537.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Dokumen	12	16.537.500
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran	Unit	82	38.587.500	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran	Unit	82	38.587.500
X.XX.1.203.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	3	38.587.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	3	38.587.500
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran	%	97	864.701.302	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran	%	97	864.701.302



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.1.205.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pangandaran	Unit	20	137.812.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pangandaran	Unit	20	137.812.500
X.XX.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pangandaran	Paket	3	277.672.552	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pangandaran	Paket	3	277.672.552
X.XX.1.205.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Dokumen	5	29.216.250	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Dokumen	5	29.216.250
X.XX.1.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Orang	40	420.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Orang	40	420.000.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran	%	94	1.020.740.810	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran	%	94	1.020.740.810
X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	78.828.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	78.828.750
X.XX.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	385.820.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	385.820.000
X.XX.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	55.125.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	55.125.000



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	158.570.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	158.570.000
X.XX.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Dokumen	4	16.167.060	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Dokumen	4	16.167.060
X.XX.1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Laporan	12	51.005.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Laporan	12	51.005.000
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	100	275.225.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Laporan	100	275.225.000
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran	%	94	495.783.750	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Kab. Pangandaran	%	94	495.783.750
X.XX.1.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Unit	n/a	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Unit	n/a	-
X.XX.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	151.500.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Paket	1	151.500.000
X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Unit	15	191.268.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Unit	15	191.268.750



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.1.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Unit	10	153.015.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Unit	10	153.015.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran	%	95	2.776.405.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran	%	95	2.776.405.000
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Laporan	1	11.025.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Laporan	1	11.025.000
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Laporan	4	381.780.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Laporan	4	381.780.000
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Laporan	4	2.383.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	Laporan	4	2.383.600.000
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran	%	96	893.710.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran	%	96	893.710.000
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangandaran	Unit	25	239.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangandaran	Unit	25	239.370.000



Kode	RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
X.XX.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran	Unit	6	165.375.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran	Unit	6	165.375.000
X.XX.1.209.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	Unit	10	55.125.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	Unit	10	55.125.000
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	Unit	25	173.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	Unit	25	173.250.000
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran	Unit	1	260.590.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran	Unit	1	260.590.000



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok Bapenda adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan, maka OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tidak mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan atau menampung usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana didalamnya termuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2019 - 2024 dan memuat juga Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN tahun 2019 - 2024 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan dan demokratis berdasarkan negarahukum.
3. Mewujudkan politikluar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,majudansejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingannasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadiandalam kebudayaan.



Untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut dengan NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 "**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi**" (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif) Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 5 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat

peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

2. Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
3. Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
4. Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta
5. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

1. Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;
2. Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;
4. Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
5. Kelima, mewujudkan pesantren juara;

6. Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;
7. Ketujuh, gerakan membangun desa;
8. Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta
9. Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

3.4 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga



Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
<i>Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>		keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian,



Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Pembangunan, Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<p><i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i></p>	Pangandaran Juara	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan



Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
		kerukunan kehidupan beragama
		Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

3.5 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sbb:

3.5.1 Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu :
“Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

3.5.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran antara lain :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	1 %



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024							Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				20.584.897.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21.235.303.499
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	KEUANGAN				8.287.347.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.730.408.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	%	100	8.287.347.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	8.730.408.500
		Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	%	100				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%	100				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	%	20	8.287.347.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20	8.730.408.500
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	%	100				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Wajib Pajak	150				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150	



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024							Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	%	100				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Dokumen	12				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12	
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	%	76				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78	
5.2.4.201.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	652.358.950			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3	665.406.129
5.2.4.201.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	209.610.662			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	213.802.875
5.2.4.201.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	499.420.760			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12	509.409.175
5.2.4.201.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Paket	5	1.473.085.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5	1.499.861.263
5.2.4.201.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	1.267.923.700			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2	1.293.282.174
5.2.4.201.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	171.886.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3	175.324.485



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024							Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
5.2.4.201.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	20000	498.410.760			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20000	688.378.975
5.2.4.201.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	2	292.945.022			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2	398.803.922
5.2.4.201.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1500	800.117.677			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1500	816.120.030
5.2.4.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	1	483.069.327			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	492.730.713
5.2.4.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4200	1.009.552.570			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4200	1.029.743.621
5.2.4.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	245	171.876.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			245	175.314.285
5.2.4.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	60	670.909.670			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60	684.327.863
5.2.4.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	20	86.179.402			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20	87.902.990
	NON URUSAN							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024							Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
	NON URUSAN				12.297.550.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12.504.894.999
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	93	12.297.550.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			94	12.504.894.999
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	95				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96	
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	97				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	97	55.125.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98	57.881.250
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	97				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	97				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98	
X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	38.587.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4	40.516.875



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Prakiraan Maju Tahun 2025			
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	16.537.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4	17.364.375
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	90	6.152.496.638			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99	6.232.646.921
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	280	6.064.296.638			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			280	6.140.036.921
X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	38.587.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5	40.516.875
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	16.537.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	17.364.375
X.XX.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	16.537.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12	17.364.375
X.XX.1.202.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	16.537.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12	17.364.375
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	82	38.587.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86	40.516.875
X.XX.1.203.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	38.587.500			PENDAPATAN ASLI			3	40.516.875



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024							Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
								DAERAH (PAD)				
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	97	864.701.302			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99	907.936.366
X.XX.1.205.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20	137.812.500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20	144.703.125
X.XX.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	277.672.552			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3	291.556.179
X.XX.1.205.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	29.216.250			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5	30.677.062
X.XX.1.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	420.000.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40	441.000.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	94	1.020.740.810			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96	1.036.953.050
X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	78.828.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	82.770.187
X.XX.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	385.820.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	389.678.200
X.XX.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	55.125.000			PENDAPATAN ASLI			1	57.881.250



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024							Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
								DAERAH (PAD)				
X.XX.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	158.570.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	160.155.700
X.XX.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	16.167.060			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4	16.975.413
X.XX.1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	51.005.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12	51.515.050
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	275.225.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100	277.977.250
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	94	495.783.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96	500.741.587
X.XX.1.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	n/a	-			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			n/a	-
X.XX.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	151.500.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	153.015.000
X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	191.268.750			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15	193.181.437
X.XX.1.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	153.015.000			PENDAPATAN ASLI			10	154.545.150



Rencana Kerja (RENJA) 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Prakiraan Maju Tahun 2025			
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
								DAERAH (PAD)				
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	95	2.776.405.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99	2.804.610.050
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	11.025.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	11.576.250
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	381.780.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4	385.597.800
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.383.600.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4	2.407.436.000
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	96	893.710.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97	923.608.900
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	239.370.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25	241.763.700
X.XX.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	165.375.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6	173.643.750
X.XX.1.209.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	55.125.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10	57.881.250
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	173.250.000			PENDAPATAN ASLI			25	181.912.500



Rencana Kerja (RENJA) | 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Satuan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
								Nasional	Daerah		
							DAERAH (PAD)				
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	260.590.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	268.407.700

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Pada Renja memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

Pangandaran, 30 Agustus 2023

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT, SPd, Mpd
NIP. 19730820 199802 1 002